

### **BAB III**

## **DISKURSUS KESETARAAN GENDER DAN PENINGKATAN AKTIVISME GERAKAN KESETARAAN GENDER DI IRAN**

Kehadiran feminisme dalam Hubungan Internasional sebagai sebuah paham yang mengupayakan adanya perubahan bagi kaum perempuan telah mengalami pergolakan yang amat panjang, dibuktikan dengan adanya gelombang-gelombang gerakan feminis di dalamnya dari gelombang pertama, kedua, hingga ketiga. Walaupun memiliki banyak gelombang di dalamnya, namun ide inti feminisme adalah tetap perempuan sebagai objek. Feminisme lahir karena konstruksi patriarkal yang kuat, adanya budaya misogini, adanya justifikasi terhadap teks-teks keagamaan yang melahirkan diskursus dan pada akhirnya diskursus tersebut melekat dan menjadi terpatrit pada bagaimana keadaan perempuan dimasyarakat. Menurut Ani Soetjipto sendiri dalam bukunya menjelaskan bahwa inti analisis dari feminisme adalah gender sebagai pusat analisis, karena konstruk gender yang dibangunlah yang menentukan nasib dan keadaan pada suatu kaum.

Korelasi antara feminisme dan teori *Gender Mainstreaming* yang digunakan penulis sangat jelas menunjukkan kesesuaian. Dimana keduanya bermuara pada gender, bagaimana bahasan dan pola mengenai gender dalam sebuah negara. Dapat disarikan bahwa adanya gerakan kesetaraan gender di Iran memiliki tujuan utama agar bagaimana perempuan bisa menjalankan hak dan memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Tuntutan-tuntutan yang ada adalah bukti bahwa gerakan perempuan menginginkan bahasan gender menjadi bahasan yang diutamakan, menjadi bahasan yang umum, bahasan yang dapat diterima masyarakat.

## **A. Diskursus Kesetaraan Gender**

### **1. Khatami dan Proposal Penandatanganan Konvensi CEDAW**

Seyed Mohammad Khatami lahir di Ardakan, provinsi Yazid, pada 29 September 1943 (Mikail, 2013). Terlahir dari ulama terkemuka Ayatollah Ruhullah Khatami yang selanjutnya membentuk kepribadian Khatami, sang ayah adalah sosok yang selalu mendorong Khatami untuk mengikuti perkembangan yang ada di dunia, bahkan sang ayah tidak sama sekali melarang anaknya untuk membaca karya-karya yang dilarang sekalipun (Cipto, 2004). Dari didikan sang ayah ini lah yang membentuk Khatami menjadi sosok yang memiliki hasrat kuat untuk belajar, berpikir maju dan moderat namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman.

Khatami adalah sosok yang dikenal dekat dengan rakyat, menginginkan perubahan dan tidak anti-Barat. Ideologis yang dipengaruhi dari pola ajar sang ayah, kemudian diteruskannya saat ia mengenyam bangku perkuliahan. Masa-masa perkuliahan ini yang membuat Khatami mulai mengenal dan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Barat (Cipto, 2004). Dari sinilah ide-ide cemerlangnya tentang demokrasi juga dipengaruhi, yang selanjutnya mempengaruhi kariernya. Mulai dari Ketua Pusat Studi Islam di Hamburg, anggota Majelis di Parlemen pada 1980, Kepala Institut Kayhan 1981, Menteri Budaya dan Pembinaan Islam, Kepala Perpustakaan Nasional Iran hingga Presiden Iran dua kali berturut-turut (Cipto, 2004) (Kurniadi, 2011).

Riwayat Khatami di Iran sebelum menjadi presiden sesungguhnya sudah diperhitungkan karena ide-ide yang dibawanya sejak sebagai Menteri Kebudayaan dan Pembinaan Islam hingga menjadi seorang presiden. Ide-ide briliannya seperti saat menjabat sebagai menteri, beliau mengembangkan kebebasan berpikir melalui bidang film, dimana ia mengimpor film-film barat yang dinilai dapat bermanfaat bagi rakyat,

media film dipilih karena menurutnya film dapat menyampaikan pesan secara langsung dan lebih ekspresif (Cipto, 2004). Ketika ia menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Nasional. Khatami mengkampanyekan gagasan-gagasan yang ia miliki lewat buku-buku yang ditulisnya. Dalam salah satu bukunya ia bahkan mengatakan pada kaum muslimin agar meninggalkan cara-cara berpikir yang kuno, bahwa umat Islam juga harus peka terhadap tantangan dan perkembangan zaman, oleh karena itu logika dalam berpikir perlu ditingkatkan (Argenti, 2018). Saat menjadi presiden pun ia masih tetap aktif menebarkan benih-benih demokrasi lewat pidato-pidato terbuka dan debat publiknya (Cipto, 2004).

Benih-benih demokrasi yang ditanamkan ini belum nampak hasilnya ketika Khatami sang revolusioner berhasil memikat rakyat pada pemilihan presiden tahun 1997. Dimana ia memperoleh suara sebesar 70% dan mengalahkan Nateq Nouri sebagai calon andalan yang didukung oleh kubu ulama konservatif (Aulawi, 2008). Khatami sebagai tokoh yang tidak diandalkan pada awalnya kemudian berhasil memikat rakyat lewat isu-isu kontroversial yang ia angkat, isu-isu yang awalnya tidak pernah dibawa dalam ranah pemilihan presiden. Isu-isu tersebut seperti demokrasi, HAM, pengakuan peran perempuan, keterbukaan, pluralisme, hingga pentingnya keterlibatan generasi muda (Cipto, 2004) (Aulawi, 2008). Dari isu-isu tersebut sudah tergambar jelas akan bagaimana nantinya Khatami akan memerintah.

Naiknya Khatami disini sesungguhnya dan sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat Iran menginginkan suatu perubahan yang nyata. Dinyatakan juga bahwa fenomena Khatami ini adalah yang menandai akan kejenuhan rakyat terhadap dominasi kelompok agamawan, masyarakat sadar dan menginginkan adanya kebebasan dari dogmatisme *mullah* yang gagal memberi bukti kesuksesan kehidupan (Argenti, 2018) (Aulawi, 2008).

Era kepemimpinannya dapat dikatakan progresif, Khatami berusaha mewujudkan janji-janji yang ia kemukakan dimasa kampanyenya. Khatami sebagai seorang cerdas pandai juga merealisasikan ide-ide fenomenalnya soal eksistensi demokrasi, hubungan dengan Barat dan pentingnya peran perempuan. Seperti mengangkat partisipasi dari kaum perempuan dikabinet dengan dipilihnya Masoumeh Ebtekar sebagai wakil presiden, menaruh 13 perempuan dalam parlemen, membangun kabinet dengan susunan kaum reformis, menjalankan politik rekonsiliasi dengan tidak berporos selalu pada pemenuhan ideologis Iran, memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab dan Islam yang ditunjukkan lewat terpilihnya Iran sebagai tuan rumah Konferensi OKI pada 1997, lalu memperbaiki hubungan dengan negara-negara Eropa (Cipto, 2004) (Kurniadi, 2011).

Khatami dengan ideosinkratisnya soal demokrasi bahkan mengeluarkan ide yang revolusioner. Khatami berani menyuarakan pikiran-pikiran rasionalnya meski akan menghadapi kuatnya kelompok ulama fundamentalis. Pemikiran moderatnya seperti dengan gagasan adanya Dialog Peradaban dengan Barat. Walau gagasan ini ditolak keras pastinya oleh kelompok konservatif tapi bisa dilihat bahwa pikiran Khatami memang sangat berbeda dengan pendahulu-pendahulunya. Gagasan ini ada karena keprihatinannya terhadap politik dalam negeri Iran dan keadaan dari dunia internasional, beliau mengatakan langsung pada pertemuan puncak OKI yang digelar di Tehran tahun 1997 bahwa keberhasilan Barat memang tidak bisa dinafikan, namun kesalahan barat juga tidak bisa dihilangkan, dari ini semua Islam sebagai sebuah peradaban besar juga perlu belajar dan melihat keberhasilan barat, dengan ini perlu dirumuskan dengan adanya dialog peradaban (Cipto, 2004). Bahkan dalam pidatonya Khatami tak segan memuji Amerika, pidato yang ia kemukakan berbunyi

“Telah saya katakan sebelumnya bahwa saya menghormati bangsa Amerika yang besar. Peradaban

Amerika layak dihormati, peradaban Amerika adalah fakta bahwa paham kebebasan memandang agama sebagai tempat bagi pertumbuhannya, dan agama memandang perlindungan bagi kebebasan sebagai tugas sucinya” (Aulawi, 2008).

Menurutnya tujuan diadakannya dialog peradaban ini adalah untuk menghapus bentuk dominasi dari negara besar dan mewujudkan perdamaian dunia (Kurniadi, 2011). Dari perkataannya ini pula sangat direspon positif oleh PBB karena pada tahun itu memang merupakan tahun-tahun panas akan pertentangan antar peradaban yang kian menyulut karena thesis Samuel Huntington yang berjudul *Clash of Civilization*. Respon positif ini diwujudkan oleh PBB dengan menjadikan tahun 2001 sebagai *United Nations Year of Dialogue among Civilization*, yang selanjutnya dengan ini menjadikan dapat dijadikan wadah bagi perempuan diberbagai belahan dunia untuk saling berbagi pengalaman, memperoleh pengetahuan, dan masuk dalam *global women movement* (Bakhshizadeh, 2018). Lebih lanjut sebagai seorang yang dekat dengan rakyatnya dan sering menyebarkan prinsip-prinsip demokrasi melalui pidato-pidatonya, kemudian pemikirannya ini ia jadikan dalam satu buku dan diberi judul *Membangun Dialog Antar Peradaban* (Cipto, 2004) (Aulawi, 2008).

Pandangannya yang terbuka akan Barat tapi tidak membuat Khatami lupa diri akan prinsip *Velayat el-Faqeh* yang telah digoreskan oleh Ayatollah Khomeini. Khatami tetap memegang teguh prinsip imam ini. Menurutnya belajar terhadap suatu peradaban adalah suatu keharusan termasuk pada Barat tapi dalam menerima pembelajaran yang ada masyarakat tetap harus selektif terhadap infiltrasi budaya yang masuk dan menghubungkan pemahaman-pemahaman yang masuk dengan budaya dan kondisi di Iran (Prayugo, 2005).

Sebagai sosok yang disegani Khomeini sangat yakin bahwa prinsip demokrasi memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mewujudkan demokrasi yang ia inginkan membangun hubungan dengan kaum muda, berdialog dengan

mahasiswa, mendorong kebebasan pers, meningkatkan peran media massa sebagai media komunikasi publik sekaligus media politik, menyelenggarakan pemilu daerah pertama sepanjang tahun 1979 sampai 1989, hingga pengakuan penting terhadap perempuan (Cipto, 2004) (Aulawi, 2008).

Kemoderatan Khatami soal perempuan sangat membawa angin perubahan positif di Iran. Pada masa inilah kekuatan dari kelompok perempuan mulai diperhitungkan dan diperhatikan. Salah satunya adalah dengan itikad Khatami untuk mendatangi *The Convention of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau dalam bahasa disebut sebagai Konvensi Perempuan. Dari sini terlihat bagaimana Khatami memandang Barat, bahwa tidak selamanya nilai-nilai Barat itu buruk, terlebih mengenai pembahasan soal kedudukan perempuan. Awal mula niatan ini ada ketika pada tanggal 23-28 Februari 1997 pemerintah Iran mengundang Komite CEDAW untuk pertama kalinya, pemerintah Iran meminta Komite CEDAW untuk berbicara didepan Asosiasi Solidaritas Perempuan Iran tentang Konvensi Perempuan, bagaimana peran Komite CEDAW, hingga soal apa yang harus dilakukan negara ketika menjadi peserta konvensi, hal inilah yang menjadi sinyal positif akan niat Iran sebagai pihak yang nantinya akan menandatangani konvensi ini (Shilawati, 2013).

Namun niat baik untuk menjadi penandatanganan konvensi ini yang sudah melalui pembahasan panjang mulai dari kabinet hingga parlemen yang telah menyetujuinya justru ditolak oleh Dewan Perwalian atau *Guardian Council*, dengan alasan sebagai produk Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Shilawati, 2013). Usaha ratifikasi CEDAW ini diteruskan dilakukan hingga termin kedua pemerintah Khatami, diteruskan kedua ini parlemen bahkan menambahkan prasyarat kondisi ketika nantinya Iran meratifikasi CEDAW seperti Iran hanya menerima prinsip-prinsip CEDAW yang sesuai dengan nafas Islam dan pengadilan internasional tidak bisa melakukan urusan intervensi terhadap urusan dalam negeri Iran

(Bakhshizadeh, 2018). Realisasi dari rencana ini pun sampai sekarang tidak ada progres, niatan akan penandatanganan Konvensi CEDAW ini pada praktiknya memang terganjal oleh kuatnya peran Dewan Garda atau *Guardian Council*, dewan yang didominasi ulama fundamentalis dan menjadi salah satu basis kekuatan kelompok ulama.

Perubahan paling mengemuka pada era Khatami yang paling disoroti dalam penelitian ini adalah upaya pengajuan proposal untuk penandatanganan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) atau Konvensi Perempuan. Suatu konvensi yang dibuat dengan tujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan akses yang seadil-adilnya bagi perempuan. Dari sini negara sebagai aktor legal-formal yang memiliki kekuatan hukum dan kedaulatan, dituntut untuk bisa menghapuskan perlakuan tersebut dengan meratifikasi konvensi ini. Seperti sifat-sifat perjanjian internasional yaitu *pacta sunt servanda* yang artinya perjanjian ini meningkat dan mengharuskan negara tunduk pada apa yang telah disepakati. Disini terdapat inti, bahwa jika negara meratifikasi konvensi ini maka negara tersebut harus bisa memainkan peranannya dengan memasukan dan menuangkan isi perjanjian yang ada pada hukum yang tertulis.

Konvensi Perempuan adalah konvensi yang dianggap sebagai konvensi dengan mekanisme yang jelas dan komprehensif, dimana didalamnya tertuang dengan jelas definisi-definisi dan batasan yang ada mengenai status dan hak perempuan juga soal diskriminasi itu sendiri. Seperti contohnya tercantum jelas dalam pasal 1 yang menjelaskan mengenai definisi dari diskriminasi, bahwa yang disebut dengan diskriminasi yaitu ketika terjadi perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang ada dan dibuat berdasar jenis kelamin, dan hal-hal tersebut mempunyai tujuan untuk mempengaruhi, mengurangi, merampas pengakuan atas hak asasi manusia (UN Women National Committee Australia). Konvensi ini memberikan peluang bagi perempuan untuk

dapat terlibat dan terpenuhi hak-hak fundamentalnya baik itu pada bidang politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, hukum, pernikahan, hingga hubungan dalam keluarga (Shilawati, 2013).

Hadir dengan tujuan mulia untuk memberikan keadilan pada perempuan soal hak yang dimilikinya dan posisinya yang juga menjadi subjek hak asasi manusia, membuat konvensi ini menjadi konvensi yang memiliki sifat khusus pada pemenuhan status dan hak perempuan. Pemenuhan tersebut dapat terlihat dari adanya praktik *affirmative action* atau perlakuan khusus sementara dalam perjanjian ini yang dimandatkan pada aktor negara. Praktik ini dilakukan mengacu pada masih tertinggalnya kondisi perempuan diberbagai belahan dunia, dari sini perlu kemudian adanya perlakuan khusus sementara yang diberikan negara demi mengejar ketertinggalan yang dialami kaum perempuan dengan cara seperti yang terdapat dalam pasal 5 yaitu mengubah konstruk tingkah laku sosial budaya baik pada laki-laki dan perempuan untuk penghapusan prasangka-prasangka, atau praktik yang menjurus ke stereotip atau inferioritas atau superioritas dan menjamin pendidikan keluarga yang tepat bahwa berkeluarga adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan (Shilawati, 2013).

Kondisi ketika negara sudah melakukan penandatanganan terhadap perjanjian internasional yaitu harus tunduk terhadap apa yang telah disepakati ini yang membuat penulis menilai bahwa Khatami memiliki keinginan untuk menghentikan praktik pembedaan yang ada pada perempuan melalui adanya penandatanganan Konvensi CEDAW yang dapat dijadikan sebagai kerangka hukum nantinya. Lebih dari pada itu pentingnya penandatanganan terhadap konvensi ini juga mempunyai tujuan untuk mengurangi dan meniadakan pandangan-pandangan negatif yang sering ditujukan kepada Iran, negara yang dianggap sering melanggar hak-hak perempuan (Shilawati, 2013). Adanya ratifikasi terhadap

Konvensi CEDAW adalah langkah awal untuk mengakhiri ketimpangan yang selama ini ada.

Masa-masa kepemimpinan Khatami selama dua periode dengan ide-ide yang revolusioner ini yang kemudian dianggap sebagai masa tumbuh suburnya peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan di Iran (Prayugo, 2005). Khatami melakukan perubahan yang besar hingga menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan janji-janjinya. Namun lagi, pemerintahannya selalu diganjak akan kuatnya ulama konservatif yang membuat program-program Khatami tidak semuanya menjadi berhasil bahkan Khatami dianggap lumpuh dalam menjalankan periode kedua kepemimpinannya (Cipto, 2004). Sekaligus ditahun-tahun Khatami berkuasa ini pula menjadi menguatnya polarisasi kubu di Iran, dengan reformis yang menginginkan perubahan yang dihadapkan dengan kelompok ulama yang menganggap dirinya sebagai penjaga revolusi suci. Masa-masa Khatami dianggap sebagai peretemuan antara tradisi dan modernitas, implementasi demokrasi dengan dijalkannya teokrasi, hingga eksistensi antara hak asasi manusia dan hukum religi (Ridho, 2016). Pada masa ini juga menjadi awal dari kehadiran perempuan yang mulai diperhatikan dan diperhitungkan dalam kehidupan sosial dan politik di Iran.

Keinginan mengenai adanya wacana kesetaraan gender di Iran sesungguhnya sudah terlihat dari naiknya Khatami sebagai presiden Iran, sosok yang digadang-gadang mampu membawa angin segar terhadap perubahan Iran menuju ke arah yang lebih demokratis. Khatami adalah orang yang dianggap mampu mendengar isu-isu yang rakyat inginkan seperti kebebasan, pengakuan hak pada perempuan, hingga demokratisasi Iran. Melalui pemikirannya yang revolusioner dan tidak anti terhadap suatu paham, Khatami sebagai seorang presiden berusaha mengupayakan adanya suatu perubahan dari ideonsinkratisnya. Perubahan yang terjadi pada kepemimpinannya dimotori oleh semangat dirinya sendiri dalam melihat realitas yang ada. Khatami dalam

konteks sebagai presiden mampu menggunakan posisinya yang istimewa yang untuk memberikan dan mengembangkan norma baru di Iran yaitu demokrasi. Ia sebagai motor perubahan memiliki caranya tersendiri dalam menciptakan dan mempengaruhi masyarakat Iran untuk menumbuhkan benih-benih demokrasi. Dari sini kemudian Khatami sering dijuluki sebagai pejuang demokrasi Iran (Aulawi, 2008).

Khatami dengan segenap pemikirannya juga kemudian berusaha bertindak untuk mengurangi ketegangan antara Iran dengan dunia Barat, terlebih mengingat posisi Iran yang sangat sering tidak diuntungkan dalam hubungan antarnegara. Iran sering dituduh sebagai negeri Islam yang kolot, gudang para teroris bahkan pelanggar hak asasi manusia terkhusus bagi perempuan. Upaya perubahan diantaranya dengan dialog peradaban dan upaya ratifikasi Konvensi CEDAW. Tujuan utama dari adanya perubahan-perubahan yang ia gagas adalah jelas untuk mengurangi dan mengkonfrontir pandangan buruk dunia mengenai Iran, untuk mengembalikan lagi nama besar Iran didunia internasional, serta agar Iran dapat memainkan peranannya dalam berbagai peristiwa internasional.

Masa pemerintahan Khatami dilihat peneliti sebagai awal bagaimana wacana kesetaraan gender itu ada dan ingin diwujudkan. Menjadi pembahasan yang spesial kemudian, karena keinginan akan perubahan digerakan oleh orang-orang yang bercokol dalam pemerintahan itu sendiri yang memiliki pandangan reformis, meskipun pada akhirnya akan dihadang dan dihadapkan pada kekuatan kelompok ulama. Khatami sebagai orang nomor dua di Iran dianggap mampu menggunakan posisinya dengan baik untuk menciptakan iklim perubahan demokrasi di Iran seperti pada kedudukan dan hak perempuan yaitu pada pengakuan pentingnya peran perempuan, dimasukkannya perempuan dalam susunan kabinetnya, hingga niat baik untuk meratifikasi Konvensi CEDAW. Dari sini pula yang kemudian menjadi awal keran pembuka yang dianggap peneliti mempengaruhi gerakan-gerakan kesetaraan gender dimasa sesudah kepemimpinannya.

## **B. Peningkatan Aktivisme Gerakan Kesetaraan Gender**

### **1. Ahmadinejad, Kampanye *One Million Signatures*, dan Demonstrasi *Green Movement***

Dunia mengenal sosok Ahmadinejad sebagai pemimpin yang sangat sederhana, dengan ciri khasnya adalah sedan tua yang menemani kesehariannya. Selain dari karakter yang sederhana, Ahmadinejad juga dikenal dunia karena sifatnya yang sangat kontra terhadap Barat. Ahmadinejad berani melawan dominasi Barat baik dalam statement yang ia berikan seperti ketidakpercayaannya pada peristiwa Holocaust, tuntutan pada perombakan permanen member *United Nations Security Council*, hingga pernyataan soal Israel harus dihapus dari peta dunia, hingga kebijakan energi nuklir yang ia keluarkan (Mikail, 2013). Karena sikap-sikap inilah kemudian dia sering disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin revolusioner di abad ke-21 dan sandingkan dengan Hugo Chavez hingga Fadel Castro.

Mahmoud Ahmadinejad lahir di Aradan pada 28 Oktober 1956. Dibesarkan dari keluarga yang religious dan menjadi sosok yang terlibat dalam perlawanan menumbangkan rezim sekuleris Pahlevi. Ahmadinejad melihat langsung bagaimana kuatnya kuasa dan dominasi Amerika Serikat pada masa Pahlevi, dapat dilihat dari takluknya Iran yang memberikan kekebalan hukum pada penasehat-penasehat Amerika Serikat, dari sinilah kepribadian mulai terbentuk hingga terpatri bahwa Amerika telah banyak menyengsarakan Iran (Aini, 2013). Dilihatnya Iran sangat *ghar zadagi* atau sangat terpengaruh oleh Barat.

Partisipasinya Ahmadinejad dalam politik di Iran sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau aktif sejak mahasiswa dan sering menduduki posisi-posisi strategis. Kariernya dimulai dari dia mendirikan *Estami ye Danesyjuyan* sebuah himpunan mahasiswa Islam, pernah menjadi Pasukan Garda

Revousi Iran, menjabat sebagai Wakil Gubernur di Maku, menjadi Gubernur di Khoy, menempati posisi penasehat Menteri Budaya dan Bimbingan Islam, menjadi Gubernur di provinsi Ardabil, menduduki jabatan Walikota Tehran, mengajar sebagai Dosen, hingga menjabat sebagai Presiden dua kali periode (Aini, 2013) (Perdana, 2018).

Kenaikan Ahmadinejad sebagai presiden dipandang sebagai bangun kembalinya kubu konservatif setelah tertidur selama 12 tahun dibawah pemerintahan Rafsanjani dan Khatami. Disebut demikian karena memang pada nyatanya Ahmadinejad dikenal sebagai orang yang keras dan anti-Barat sejak kampanyenya. Ahmadinejad adalah sosok dengan spectrum karakter yang dianggap unik, ia adalah dosen sekaligus ia juga seorang loyalis revolusi yang kuat (Aini, 2013). Dalam perjalanan ideologisnya Ahmadinejad banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh revolusi seperti Ali Shariati dan Ayatollah Khomeini, bahkan Ahmadinejad disebut sebagai replika Khomeini karena pemikirannya terhadap hukum Islam terkhusus pada Khomeini.

Meskipun dirinya dikenal dekat dan bersahaja dengan rakyat, bahkan ia pernah mengatakan bahwa “saya punya tampang pelayan dan saya hanya ingin menjadi pelayan rakyat” (Khan, 2007). Namun ia tetaplah seorang yang setia terhadap nilai-nilai revolusi, Ahmadinejad sangat berusaha menegakan tegaknya nilai-nilai revolusi Islam yang telah digoreskan sebelumnya. Jika pada era Khatami perempuan diberi peran khusus dan statusnya diperhatikan, maka sangat berbeda dengan era Ahmadinejad. Kepemimpinannya dikenal ketat, dimana kondisi perempuan mengalami pembatasan kembali baik pada bidang sosial politik, berbusana, kebebasan, kegiatan advokasi, aktivitas akademik hingga bidang ekonomi (Shofiyah, 2019). Selama dua periode menjabat sebagai seorang presiden, Ahmadinejad melakukan restriksi-restriksi kembali pada semua wargenagara tak terkecuali dengan kedudukan dan hak perempuan.

Ahmadinejad menghasilkan berbagai kebijakan diantaranya seperti larangan pada hal-hal yang berbau barat seperti musik, radio, televisi, dan film, kemudian pada Oktober 2006 ia menyeru perempuan untuk kembali ke rumah untuk mencurahkan tanggungjawab dalam membesarkan anak, melakukan operasi keamanan dengan menempatkan polisi-polisi moral yang bertugas menjaga syariah agar tetap berjalan dan salah satu target dari operasi ini pada gaya berpakaian baik pada laki-laki maupun perempuan, operasi ini menangkap sekitar 150.000 orang (Shofiyah, 2019). Tidak berhenti sampai disini, seperti yang sudah disebutkan dalam paragraf sebelumnya kebebasan berkespersi pun juga mendapati perilaku demikian, pemerintah mengawasi gerak-gerik masyarakat, melakukan pengawasan dan pemfilteran terhadap media sosial, membredel jurnal dan koran yang kontra terhadap pemerintah, menutup NGO atau kelompok-kelompok yang berafiliasi pada isu kesetaraan gender, menangkap aktivis-aktivis pegiat HAM (Bakhshizadeh, 2018).

Ahmadinejad dan kelompok ulama dibelakangnya juga dikenal represif terhadap tuntutan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksi damai para aktivis gender yang digelar pada 12 Juni 2006 untuk menyuarakan protes terhadap hukum diskriminatif tapi dibalas oleh tindakan brutal yang dilakukan rezim hingga menangkap sekitar 50 hingga 70 aktivis, aktivis-aktivis tersebut dipukul, ditangkap, dan diberi hukuman seperti sebagai tahanan kota dan tidak boleh bepergian ke luar negeri (Sedighi, 2009) (The Guardian, 2009).

Gaya pemerintahanya yang sangat berbanding terbalik dengan rezim-rezim sebelumnya yaitu Khatami dan Rafsanjani ini kemudian menghasilkan aksi-aksi protes yang fenomenal. Aksi-aksi ini lebih lanjut bahkan dipelopori oleh perempuan-perempuan yang menginginkan kebebasan dan keadilan dari hak yang seharusnya ia miliki sebagai warganegara. Diantaranya adalah *One Million Signatures* dan *Green Movement*. *One Million Signatures Campaign* atau dalam bahasa “Kampanye Satu Juta Kutip Tandatangani” adalah

salah satu kampanye kesetaraan gender yang berasal dari Iran dan telah mendapatkan atensi dari dunia internasional. Kampanye ini sesuai dengan namanya memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan satu juta kutip tanda tangan sebagai alat untuk melawan hukum diskriminatif yang diterapkan oleh negara pada perempuan (Bakhshizadeh, 2018). Hal ini didasari karena adanya perbedaan-perbedaan yang diskriminatif pada perempuan baik dari segi budaya maupun hukum yang berlaku di Iran, seperti yang sudah penulis jelaskan dalam bahasan sebelumnya, dimana dari ini dapat dilihat bahwa posisi perempuan di Iran berbeda dengan posisi laki-laki.

**Gambar 3. 1 Logo Kampanye One Million Signatures**



Sumber: (RadioFreeEuropeRadioLiberty, 2009)

*One Million Signatures* dalam mewujudkan tujuannya untuk mengumpulkan satu juta tanda tangan sesungguhnya juga memiliki maksud lain, seperti meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan dampak kebijakan yang diskriminatif, mendorong masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender, mempromosikan kolaborasi dan kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan suatu perubahan sosial, memberikan wadah bersuara untuk kaum perempuan, memperkenalkan masyarakat akan demokrasi yang mendukung kebebasan (Sedighi, 2009) (Bakhshizadeh, 2018). Kampanye ini ingin memberikan konstruksi pada masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender bagi masyarakat Iran, akan pentingnya

penghargaan terhadap perempuan juga merupakan bagian dari warganegara dan objek dari hak asasi manusia.

Layaknya kampanye-kampanye lain kampanye ini juga memiliki cara dalam menggulirkan tuntutan. Kampanye ini memiliki dua cara yaitu lewat tatap muka dan pemanfaatan jaringan siber. Melalui tatap muka dan dialog, dimana kampanye ini hadir ditengah-tengah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, mereka mendatangi dari rumah ke rumah, mendatangi tempat-tempat dimana perempuan biasanya berkumpul, mereka melakukan tujuan lainnya yaitu untuk menumbuhkan orang-orang yang simpatik terhadap isu gender tidak hanya pemenuhan target tanda tangan semata (Voanews.com, 2009).

Melalui jaringan siber dengan dibuatnya web *changebeforequality.com* yang semakin berkembang menjadi 3 website lain dan memiliki website-website di tiap negara yang terdapat diaspora masyarakat Iran (Sedighi, 2009). Mengingat internet adalah cara alternatif yang bisa digunakan walau masih ada kemungkinan pengawasan dari rezim, regulasi di Iran sendiri sejak Revolusi 1979 sangatlah ketat dimana pemerintah membatasi setiap pergerakan dari tiap kelompok atau organisasi yang ada, termasuk kegiatan-kegiatan seperti kampanye atau pertemuan hanya bisa digelar oleh lembaga yang diakui dan mendapat izin pemerintah, akibatnya gerakan-gerakan yang tidak berafiliasi atau menentang pemerintah harus menjalankan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi seperti kampanye ini yang menggunakan rumah-rumah anggota berkumpul dan berkoordinasi (Voanews.com, 2009).

Kampanye ini sangat berbeda dengan kampanye-kampanye lain yang biasanya berafiliasi pada suatu ideologi tertentu, kampanye ini justru hanya berfokus pada pemenuhan tuntutan utama mereka yaitu penghapusan hukum diskriminatif pada perempuan. Kampanye yang lahir dari adanya pertemuan pasca aksi brutal pemerintah pada

demonstrasi 12 Juni 2006 yang menentang adanya hukum diskriminatif pada perempuan ini memiliki 3 pedoman dalam menjalankan kegiatannya yaitu *Statement of Campaign*, dimana mereka mengumpulkan tanda tangan sebagai sumber untuk melawan rezim dan memperlihatkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran akan gender, lalu *The Plan Of Campaign*, tahapan ini adalah soal penjelasan dari kampanye ini meliputi tujuan dan target, dan terakhir adalah *The Impact of Law in Women Lives*, pada bagian ini aktivis dari kampanye bekerjasama dengan ahli hukum untuk membuat draft hukum yang baru dengan harapan dapat menggantikan hukum yang diskriminatif (Sedighi, 2009) (Sameh, 2014). Tuntutan-tuntutan kampanye ini diantaranya

1. Undang-undang perkawinan, dimana walau sudah ditetapkan usia minimum pernikahan tetapi pernikahan tetap bisa berlangsung ketika wali mengizinkan
2. Hak kewarganegaraan pada perempuan, yaitu kewarganegaraan perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Kewarganegaraan pada perempuan tidak dapat menurun pada anaknya, artinya walau memiliki ibu warganegara Iran tapi belum tentu anak tersebut menjadi warganegara Iran
3. Perceraian, pada praktik ini laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Dibuktikan dengan undang-undang bahwa laki-laki dapat dengan mudah menceraikan istrinya kapanpun yang ia inginkan, sedang perempuan ketika ingin menggugat cerai harus bisa membuktikan akan kelakuan buruk suaminya pada pengadilan
4. Usia pidana, kampanye ini menuntut usia pidana yang terlalu muda yaitu 8 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Dengan hanya satu kondisi pengecualian

yaitu ketika anak tersebut mendapat kasus eksekusi maka eksekusinya akan ditunda hingga ia berumur 18 tahun. Artinya ketika ada anak dengan batas minimum tersebut melakukan kesalahan maka dia akan dihukum dan diperlakukan layaknya orang dewasa

5. *Blood money* atau uang darah, sejenis dengan uang yang diberikan ketika seorang melakukan kesalahan atau bahkan pembunuhan. Sejenis uang yang dapat diterima ketika menjadi korban. Pada praktik ini hak yang seharusnya diterima oleh perempuan lebih rendah dari pada yang diterima oleh laki-laki. Porsi perempuan untuk mendapatkan haknya adalah setengah dari porsi laki-laki
6. Warisan, tuntutan yang ada pada pemberian warisan pada anak laki-laki lebih banyak dua kali lipat dari pada anak perempuan dan pemberian warisan pada seorang istri ketika ayah atau suaminya meninggal
7. Poligami, negara yang memberikan kebijakan bahwa laki-laki berhak menikah seorang perempuan perempuan sebanyak 4 kali dan memiliki kebebasan dalam melakukan nikah mutah atau kawin kontrak
8. Hak bersaksi, perempuan dalam ini dibatasi dalam sejumlah bahasan seperti homoseksualitas, prostitusi, dan sodomi. Dalam haknya sebagai saksi bahkan suara seorang perempuan hanya dinilai dari setengah dari suara seorang lelaki (Sedighi, 2009).

Kampanye ini sendiri adalah kampanye yang strukturalis, dimana memandang perlu adanya perubahan dari struktur dan hirarki yang ada (Sameh, 2014). Seperti yang

sudah kita ketahui dari bahasan-bahasan sebelumnya soal bagaimana peran pemerintah terutama soal kuatnya kelompok ulama yang ada dan adanya hukum diskriminatif yang ada yang membuktikan bahwa perempuan adalah warganegara kelas dua. Dari catatan majalah Glamour disebut bahwa kampanye ini menjadi ancaman serius rezim, bunyi catatannya sebagai berikut

*“Iran’s religious, conservative government sees the campaign as a real threat. Authorities have arrested more than 50 campaign members, who have been punished with everything from lashing to solitary confinement in prison. The group’s website has been shut down by the government 21 times. Members hold clandestine meetings in living rooms and basements, and activists say they are under constant surveillance and subject to phone taps. (RadioFreeEuropeRadioLiberty, 2009)”*

Dari catatan tersebut sekaligus dapat terlihat akan kampanye ini bekerja, bahwa aktivisme kelompok penggiat kesetaraan gender pun mengalami hal yang sama dimana banyak dari mereka yang harus menerima konsekuensi berupa sanksi atau bahkan tahanan. Mereka ditangkap dengan tuduhan melakukan propaganda terhadap rezim, meracuni pandangan masyarakat, hingga membahayakan ideologi nasional (Bakhshizadeh, 2018).

Dibalik ketatnya pengawasan rezim yang ada namun gerakan ini terus berjalan dan menghasilkan perkembangan yang signifikan. Kampanye yang dimulai pada 27 Agustus 2006 ini, dalam kurun waktu 2 tahun sudah bisa memperluas jaringannya ke 20 kota di 13 provinsi di Iran, di luar Iran kampanye ini juga mampu menyebar ke 7 negara dikawasan Timur Tengah, Eropa, dan Amerika yang disebabkan oleh diaspora masyarakat Iran disana (Sedighi, 2009). Menjadi bukti bahwa gerakan kesadaran akan kesetaraan gender juga memiliki tempat dihati masyarakat Iran. Terlebih soal

bagaimana perempuan yang memiliki sejarah yang panjang dalam proses sejarah Iran. Kesuksesan lain adalah gerakan ini mendapat banyak atensi dari masyarakat internasional seperti dengan mendapat penghargaan diantaranya *the Olof Palm Prize* tahun 2007, *the National Endowment for Democracy Award* tahun 2008, *Simone de Beauvoir Award* tahun 2009, *the Global Women's Right by Feminist Majority Foundation* tahun 2009 (Sedighi, 2009). Tidak hanya dari dunia luar, bahkan kampanye ini pun mendapat dukungan yang tidak diduga, ulama yang biasanya sangat kontra pada gerakan kesetaraan gender justru malah memberikan dukungan, dialah Ayatollah Sane'i yang makin menambah aktivisi-aktivis pada kampanye ini semakin yakin akan hak yang dituntutnya (Sedighi, 2009).

Thesis yang ditulis oleh Gilda Sedighi yang mana ia melakukan observasi langsung di Iran, ia menyatakan bahwa gerakan kampanye ini adalah gerakan yang dibuat asli dari masyarakat Iran karena dapat dilihat dari konteks gerakan dan aksi-aksi yang ada (Sedighi, 2009). Artinya dengan ini *One Million Signatures* adalah *local movement* yang kehadirannya berdiri sendiri.

Kesuksesan dari kampanye ini juga dapat dilihat dari keberhasilan *lobbying* yang dilakukan bersama gerakan-gerakan perempuan lain dengan parlemen dan kelompok ulama untuk menghapuskan pasal yang merestriksi status perempuan yaitu pasal 23 yang berisikan laki-laki boleh menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya dan pasal 25 tentang dikenakan pajak pada mahar perempuan dalam pengajuan *Family Bill* ditahun 2007, hingga akhirnya rancangan tersebut disepakati parlemen pada tahun 2013 dengan penghilangan dua pasal tersebut (Bakhshizadeh, 2018).

### *Gambar 3. 2 Demonstrasi Green Movement*



Sumber: (The Guardian, 2013), (Sams, 2019)

Aksi protes lain yang terekam selama kepemimpinan dua periode berturut-turut Ahmadinejad adalah demonstrasi besar-besaran ditahun 2009. Dimana demonstrasi ini terjadi karena kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan presiden 2009 yang menghasilkan kemenangan Ahmadinejad dengan suara sebanyak 62% mengalahkan kandidat reformis yang digadang-gadang menang yaitu Mir Hossein Mousavi yang hanya mendapat 34% (Yuliani, 2010). Suatu demonstrasi yang terjadi dan berawal dari jalanan-jalanan di kota Tehran dan menyebar massif keseluruhan Iran, bahkan dianggap sebagai perpecahan terbesar di Iran setelah adanya Revolusi 1979.

Pemilihan presiden pada tahun tersebut merupakan pemilihan yang panas, dapat dibuktikan dari demonstrasi yang makin membesar terkait kemenangan Ahmadinejad yang menghasilkan perdebatan seperti protes Moussavi akan 14 juta surat suara yang hilang, hingga dugaan bahwa Ahmadinejad dibantu oleh golongan ulama fundamentalis untuk mengalahkan kandidat reformis Mousavi (Reza, 2017) (Yuliani, 2010). Dari kekecewaan-kekecewaan tersebut kemudian muncul suatu aksi kolektif demonstrasi dari masyarakat Iran sekaligus dukungan dari diaspora warganegara Iran diluar negeri seperti di Eropa, Amerika, dan Australia yang masih memiliki jaringan dan peranan yang kuat (Bajoghli, 2016). Suatu aksi demonstrasi untuk menentang

kemenangan Ahmadinejad, lebih jelas aksi demonstrasi ini kemudian dikenal dengan istilah *Green Movement*. Peristiwa demokratisasi yang lebih dahulu muncul ketimbang *Arab Spring* yang terjadi pada 2010. Nama *Green Movement* sendiri didapat karena aksi ini digawangi oleh para pemuda yang lahir dari generasi pasca revolusi (Reza, 2017).

*Green Movement* adalah gerakan yang memiliki focus yaitu pemenuhan-pemenuhan terhadap prinsip demokrasi. Tuntutan-tuntannya seperti pada kebebasan dan penghargaan HAM dalam prinsip demokrasi seperti penghitungan suara ulang, kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan, menjunjung supermasi hukum, pemisahan agama dengan politik, kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap minoritas (Birgani, 2010) (Reza, 2017). Demonstrasi ini juga didukung penuh oleh ekspatriat Iran yang bermukim di Eropa dan Amerika Serikat (Sams, 2019).

Menjadi hal yang unik karena demokrasi adalah tuntutan utama, suatu perlawanan terhadap tirani rezim yang diharap dapat menimbulkan perubahan. Baik itu golongan sekuler maupun golongan Islam dalam gerakan ini dapat menyatukan pandangannya yaitu mengarah pada pemenuhan prinsip demokrasi. Dari tuntutan dan kelompok-kelompok didalamnya sudah dapat terlihat dengan jelas bahwa gerakan ini adalah gerakan yang berasal dari aspirasi masyarakat Iran sekaligus bukti akan ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim yang ada.

Pada bahasan sebelumnya sudah disinggung bahwa apa-apa yang menyinggung atau mendelegitimasi rezim pasti akan berujung dan berhadapan terhadap rezim baik itu tindakan represif, hukuman atau sanksi, hingga pembunuhan dan pengasingan. Gerakan ini pun demikian, mengalami nasib yang sama. Salah satunya dengan ditembaknya Nedha Agha Soltan oleh aparat, meninggalnya Nedha ini mendapat perhatian dari dunia internasional sekaligus menjadikan dirinya sebagai symbol terhadap gerakan anti-pemerintah

(Fathi, 2009). *Green Movement* sebagai gerakan demonstrasi yang lahir karena kekecewaan terhadap hasil pemilu ini dapat sekaligus dijadikan bukti bahwa peristiwa politik domestik seperti pemilihan presiden pun dapat berubah dan mempengaruhi konteks politik regional (Dabashi, 2013). Satu hal yang menjadi makin menarik dari gerakan ini adalah turut terlibat aktifnya peran perempuan didalamnya. Berbicara akan fakta bahwa eksistensi perempuan dan perjuangan demonstrasi adalah hal yang nyata terekam dalam sejarah Iran dan memang tidak bisa dipisahkan.

Peran perempuan dalam demonstrasi ini sangatlah besar, kehadiran seperti yang dijelaskan dalam tulisan Victoria Tahmasebi Birgani bahwa pada peristiwa ini perempuan dari segala lapisan masyarakat Iran turun tangan, baik dari mereka yang religius, non-religius, sekuler, semua ada dan terlibat dalam proses ini, mereka terlibat dalam long-march, berorasi, menyorakan dan menyanyikan kata-kata perlawanan terhadap rezim, membawa spanduk-spanduk menantang rezim, hingga menentang aparat-aparat keamanan. Perempuan sangat memegang peranan kunci berjalannya aksi karena perempuan adalah garda terdepan dalam demonstrasi yang bahkan partisipasinya melebihi partisipasi laki-laki, lebih dari itu bahkan kehadiran perempuan menjadi *buffer* atau penyangga diantara demonstran laki-laki dan aparat keamanan, dengan ini kehadiran dan peran besar perempuan dalam gerakan ini bahkan berhasil mengubah nafas dan citra gerakan menjadi suatu gerakan demonstrasi yang damai, anti terhadap kekerasan (Birgani, 2010). Besarnya perempuan dan perannya dalam gerakan ini dapat menjadikan bukti bahwa pemikiran terhadap prinsip-prinsip feminis telah merasuk dan tersebar di Iran.

## **2. Hassan Rouhani dan Kampanye Kebebasan Hijab *My Stealthy Freedom***

Perubahan signifikan pandangan dunia terhadap Iran mulai berubah setelah presiden Hassan Rouhani berhasil

melakukan perjanjian nuklir dengan negara-negara Barat yang menghasilkan perjanjian JCPOA. Setelah sebelumnya Iran sering disudutkan dalam berbagai posisi didunia internasional karena tindakan-tindakanya yang cenderung konfrontatif terhadap Barat pada masa pemerintahan Ahmadinejad. Naiknya Rouhani sebagai presiden dari kubu reformis dianggap mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat Iran. Dari perjanjian nuklir yang terwujud tadi, menjadi bukti terjadinya perubahan arah politik luar negeri Iran, sekaligus menjadi harapan bagi masyarakat Iran akan aktif kembalinya Iran dalam percaturan perpolitikan internasional dan perubahan yang terjadi didalam negeri pada kepemimpinan Rouhani.

Hassan Rouhani adalah presiden ke-9 sekaligus menjadi presiden ke-10 Republik Islam Iran alias menjadi presiden dalam masa jabatan dua kali berturut-turut. Sebelum menjadi seorang presiden, sosok yang lahir pada 12 November 1949 di Sorkeh ini memiliki riwayat karier yang sangat diperhitungkan dalam politik dalam negeri Iran. Bagaimana tidak Rouhani pernah menjadi seorang pengacara, akademisi, diplomat. Lebih dari pada itu Rouhani juga pernah menjabat sebagai Badan Pengawas Siaran Radio dan Televisi Iran tahun 1980-1983, Kepala Komite Pertahanan Majelis pada tahun 1982, bagian dari Dewan Pertahanan Agung pada 1983-1988, Komandan Pertahanan Udara Nasional tahun 1985-1991, Dewan Keamanan Nasional ditahun 1989, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional pada 1989 hingga 2005, menjadi negosiator dalam perundingan nuklir Iran pada 2008, sampai menjadi Kepala Center for Strategic Research dari 1992-2013 (Hidayat M. S., 2015).

Sosok Hassan Rouhani dilihat dari jabatan-jabatan yang pernah didudukinya sangat jelas artinya bahwa ia adalah orang lama dan diperhitungkan di Iran. Jauh sebelum menjadi orang penting Rouhani adalah anak yang terlahir dari keluarga sederhana yang kemudian dalam masa mudanya aktif dalam berbagai peristiwa Revolusi 1979, dari sini penulis juga

mendapati data bahwa Rouhani pernah menjadi juru bicara aktif Ayatiollah Khomeini dalam menyebarkan dakwah-dakwah terkait revolusi didaerahnya (Hidayat M. S., 2015). Sebagai seorang yang melalui proses revolusi dan menjadi bagian dari tim sukses Khomeini, Rouhani juga melihat bagaimana perilaku Amerika Serikat dimasa itu sama seperti dengan Khatami dan Ahmadinejad. Namun yang membedakan Khatami dengan presiden sebelumnya yaitu Ahmadinejad adalah dari cara berpikrnya. Jika Ahmadinejad dikenal tetap bersikukuh dengan prinsip anti-Barat meski Iran banyak dirugikan karena sanksi-sanksi yang ada. Tapi ini tidak pada Rouhani, ia dikenal lebih moderat dan memikirkan kondisi Iran apabila terus mengalami sanksi-sanksi yang membuat Iran merugi.

Rouhani dikenal sebagai sosok presiden dianggap lebih moderat dan dikenal dekat dengan kaum muda sampai dianggap menjadi suara kaum muda, selain itu ia dikatakan sebagai seorang yang tidak terlalu setuju dengan hukum yang ketat (Mahmood, 2016). Pembawaan yang demikian juga ia tuangkan dalam janji-janji kampanye yang ia bawakan, ia menyampaikan keinginan-keinginanya untuk melakukan perubahan terhadap Iran dari mulai dari janjinya berupa pembuatan piagam hak-hak sipil karena fakta lemahnya hak sipil pada masyarakat Iran terutama pada masa pemerintahan Ahmadinejad yang banyak menjadi korban, pemulihan kondisi perekonomian Iran yang lemah akibat embargo-embargo yang diberlakukan, hingga perbaikan hubungan dengan negara-negara Barat (Mikail, 2013).

Kepemimpinannya ia usahkan dengan mewujudkan janji-janjinya, dimana kesuksesan yang dapat diperhitungkan salah satunya adalah terciptanya perjanjian JCPOA. Dibawah Rouhani pula aturan-aturan syariah yang ada di Iran mulai dikendurkan lagi seperti di era Khatami. Salah satu contohnya adalah sedikit lunaknya aturan soal hukum menggunakan hijab dimana tidak selalu perempuan-perempuan ditangkap karena penggunaan hijab yang tidak sesuai, hingga adanya

kesempatan perempuan untuk bisa melakukan aksi-aksi perlawanan (Mackintosh, 2018). Meskipun apa yang dikatakan atau diinginkan Rouhani ini tidak dapat berjalan sepenuhnya karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa peran ulama masih menjadi dominan dan politik di Iran.

Isu hijab menjadi salah satu isu mengudara dibawah kepemimpinan Rouhani hingga sampai membawa hijab pada diskursus global karena meningkatnya aktivisme gerakan kebebasan berhijab yaitu *My Stealthy Freedom* yang menuntut adanya kebebasan berhijab bagi perempuan. Gerakan yang berawal dari adanya kampanye dimedia sosial Facebook, yang juga disebut-sebut sebagai gerakan demokratisasi online penerus gerakan demokratisasi offline sebelumnya yang mengudara pada tahun 2009 yaitu peristiwa *Green Movement* (Koo, 2016).

Suatu kampanye online yang menuntut kebebasan berkepresensi yaitu dalam penggunaan hijab, dimana fokus kampanye ini menyuarakan bahwa hijab adalah sesuatu yang berasal dari ketulusan bukan ada karena paksaan dari aturan yang dibuat pemerintah. Kampanye online yang kini memiliki jumlah sebanyak 1.042.820 pengikut dalam laman *Facebook*, yang didirikan oleh seorang jurnalis Iran bernama Masih Alinejad. Alinejad adalah salah satu diantaranya banyaknya jurnalis Iran yang terlibat dalam aksi demonstrasi *Green Movement* 2009 dan memilih pergi meninggalkan Iran karena pilihan yang diberikan pemerintah dari tindakan-tindakan kritisnya pada tahun 2009 yaitu meninggalkan Iran atau hidup dipenjara (Company, 2018).

**Gambar 3. 3 Unggahan Masih Alinejad di Facebook sebagai Pemantik Lahirnya Kampanye My Stealthy Freedom**



Sumber: (Moorhead, 2018)

*My Stealthy Freedom* adalah kampanye online yang memang berasal dari Iran dan menuntut tentang keadaan di Iran pula, tapi kampanye ini lebih dari pada itu. Kampanye ini berhasil menarik perhatian masyarakat dunia dengan aktivisme-aktivisme dan caranya mengemas isu yang dijelankannya. Suatu kampanye yang tadinya hanya berada pada media sosial namun kini berhasil mempengaruhi pola pikir masyarakat Iran maupun dunia menjadi gerakan pembebasan yang nyata. Gerakan yang tadinya hanya berasal dari adanya unduhan foto Alinejad yang menunjukkan rambut indah dan mengatakan keinginannya untuk bebas menikmati udara segar yang kemudian menuai banyak dukungan dari perempuan-perempuan Iran, hingga akhirnya Alinejad berinisiatif untuk membuat suatu platform yang tujuannya menjadi wadah bagi perempuan Iran untuk menunjukkan pada bagaimana kondisi Iran sebenarnya, menjadi tempat bertukar pikir ide yang kemudian diberi nama *My Stealthy Freedom* (Suzanne & Eliora, 2019). Sesuai

dengan namanya *My Stealthy Freedom* yang jika diartikan dalam bahasa adalah kebebasanku secara diam-diam adalah platform yang dibuat sebagai wadah perempuan Iran untuk menunjukkan kebebasannya, meski hanya berupa mengirim foto tanpa hijab dengan tidak menunjukkan wajah (Aengenvoort, 2014).

Kampanye ini pada praktiknya mengajak dan mendorong perempuan-perempuan Iran dan masyarakat dunia untuk memprotes kebijakan hijab melalui ajakan mengirimkan foto dalam laman facebook *My Stealthy Freedom*. Bahasan kunci pada kampanye ini adalah pada penolakan terhadap kewajiban berhijab tapi seiring dinamisasi didalamnya *My Stealthy Freedom* juga menyuarakan kesetaraan gender hingga pemenuhan dasar terhadap hak asasi manusia seperti pada kasus larangan perempuan untuk masuk ke stadion, izin berpergian ke luar negeri yang harus mendapat persetujuan pada suami atau wali, hingga pada titik perjuangan untuk menyuarakan suara perempuan yang masih dianggap haram diranah publik (Koo, 2016) .

Gerakan yang awalnya berbasis pada media sosial ini menelurkan kampanye-kampanyenya pada penggunaan tagar untuk menarik perhatian masyarakat dan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam aksi ini. Tagar-tagar yang ada seperti #WhiteWednesday #MenInHijab #SeeYouIranWithoutHijab.

**Gambar 3. 4 Bentuk Aksi dari Tagar White Wednesday**



Sumber: (Bakar, 2019), Laman Facebook: *My Stealthy Freedom*

Tagar #WhiteWednesday adalah tagar yang dibuat Alinejad untuk menarik masyarakat agar ikut dalam aksi penolakan terhadap hijab dengan mengajak baik perempuan maupun laki-laki untuk mengenakan pakaian putih setiap Rabu (Hatam, 2017). Tagar ini adalah tagar yang masih aktif sampai dengan sekarang. Aksi rutin ini bahkan menjadi simbol dari kampanye *My Stealthy Freedom*. Selain bertujuan untuk mengajak orang menolak aturan hijab, tagar ini juga memiliki tujuan lain untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat pada aktivis-aktivis gender yang ditahan dalam memperjuangkan kebebasan berhijab (Bakar, 2019).

Tagar WhiteWednesday yang dibuat oleh Alinejad ini juga mempunyai tujuan untuk mengajak masyarakat untuk agar bisa melakukan aksi perlawanannya secara langsung diranah publik dengan simbol pakaian putih tersebut (Bakar, 2019). Alinejad mendorong perempuan untuk berani tampil mengutarakan tuntutan mereka diruang publik sekaligus untuk tetap menjaga eksistensi gerakan yang ia buat. Aksi yang terpengaruh dari kampanye ini seperti pada kasus Vida Movahed pada tahun 2017, dimana ia berdiri di *Tehran's Enqelab Street* dengan melilitkan hijabnya pada kain dan mengibarkannya seperti bendera yang mengakibatkan dirinya

kemudian ditangkap, aksi yang kemudian menjadi inspirasi perempuan-perempuan lain untuk melakukan hal yang sama dan menyebar ke 80 kota di Iran, hingga berakibat ditangkapnya 29 perempuan yang dituduh sebagai dalang aksi protes. (Suzanne & Elicora, 2019)

Kemudian juga pada aksi dibentangkannya kain putih panjang di Kedutaan Besar Iran di London yang mendapat dukungan dari direktur *The International Observatory of Human Rights* (IOHR) yang mengatakan “*we are at an ultimate tipping point of human rights in Iran*” (Bakar, 2019). Serta aksi-aksi lain yang masih dapat dilihat ketika kita melakukan pencarian dengan tagar tersebut. Tagar ini berkembang dan juga diikuti oleh perempuan-perempuan dari luar Iran seperti diantaranya dari Arab Saudi, negara-negara di Eropa, juga Amerika Serikat (Hatam, 2017).

### ***Gambar 3. 5 Bentuk Aksi dari Tagar Men In Hijab***



Sumber: (Khalatbari, 2016)

Tagar lain yang sempat mengudara adalah #MenInHijab yang mengudara pada bulan Juli dan Agustus 2016, tagar ini juga mengajak agar kaum laki-laki agar ikut serta dalam solidaritas perlawanan terhadap kebijakan kewajiban penggunaan hijab dengan cara menggunakan hijab sebagai bentuk perlawanan (Koo, 2016). Alasan mengapa Alinejad juga mengikut sertakan peran laki-laki agar laki-laki

juga bisa merasakan bagaimana rasanya mengenakan sesuatu yang dipaksa negara (McMahon & Mackander, 2016). Hal penting lain karena masih kuatnya budaya patriarkal yang menyuguhkan posisi laki-laki masih menjadi nomor pertama dalam kehidupan di Iran baik sosial maupun politik. Seperti yang dilansir dari Independent yang mengatakan “*in our society, a women’s existence and identity is justified by a man’s integrity, and many cases the teaching of religious authority or government official influence a man’s misguided sense of ownership over women.* (Saul, 2016)” Dari posisi ini yang membuat Alinejad juga membutuhkan peran laki-laki untuk bergabung dan menyuarakan tuntutan pembebasan.

Tagar lain berupa #SeeYouIranWithoutHijab adalah tagar dengan tujuan yang sama, namun yang membedakan adalah tagar ini mengundang pada setiap perempuan-perempuan yang datang dari negara lain dan mengunjungi Iran untuk mendukung gerakan ini dengan tidak mengindahkan aturan berhijab yang diberitahukan hingga ikut serta dalam aksi protes menentang kewajiban hijab dengan melakukan swafoto dan mengirimnya pada laman Facebook *My Stealthy Freedom*. Jelasnya seperti pada tulisan Gi Yeon Koo yang mengatakan

*“We are calling on all female tourists visiting Iran to come and support the refusal of stewardesses working for Air France to wear the veil on flights once they are in Iran. We are also asking them to support the My Stealthy Freedom Campaign. As a sign of support, here is what you can do: when you visit our beautiful Iran, you can take a photo without the compulsory headscarf as a sign of protest and send it to this campaign. On this Facebook page, you will see lots of such photos taken by Iranian women inside Iran. Please be as brave as them and say no to discriminatory law. Women must have the right to choose how they dress (Koo, 2016).*

Aktivisme gerakan ini sangat berpengaruh besar pada aksi perlawanan perempuan terhadap adanya hukum diskriminatif yang ada. Dilansir dari Brookings, pemerintah pun mengakui bahwa ada koneksi yang jelas yang ditimbulkan gerakan ini (Suzanne & Eliora, 2019). Akibatnya sampai sekarang pun aksi protes masih terus ada. Mulai dari Viva Movahed yang mengibarkan hijabnya layaknya bendera di Enghlab Street pada 2017 hingga meninggalnya Sahed Khodayari atau yang dikenal dengan julukan Blue Girl pada Oktober 2019 kemarin. Khodayari meninggal dengan cara membakar dirinya karena ketakutan akan sanksi pengadilan akibat perilakunya yang menyamar sebagai seorang laki-laki demi bisa masuk ke stadion sepakbola untuk menonton pertandingan (BBC News, 2019).

Gerakan yang berasal dari kampanye ini sangat bertumpu pada peran media sosial seperti Facebook dan sekarang merambah pada ranah Instagram pribadinya. Mengudaranya gerakan ini tak lepas dari peran besar Masih Alinejad selaku sang penemu. Dimana Alinejad adalah sosok yang dikenal vokal dalam menyuarakan kebebasan berhijab di Iran. Sebagai pengelola laman *My Stealthy Freedom* sudah ribuan foto dan video yang ia bagikan entah itu bentuk aksi protes para perempuan hingga tindakan sewenang-wenang polisi moral yang kasar terhadap perempuan. Melalui kampanye ini ingin menunjukkan pada dunia mengenai keadaan Iran yang benar-benar terjadi di Iran, mengenai bagaimana koersifnya rezim.

Keberadaan media sosial baik Facebook maupun Instagram menjadi elemen penting dalam gerakan pembebasan di Iran. Melalui media ini lah gerakan ini membentuk opini publik, melaukan penyebaran informasi terhadap kondisi Iran, bahkan hingga berhasil membuat hijab menjadi diskursus dalam tatanan global (Koo, 2016). Media sosial menjadi kunci dalam gerakan kesetaraan gender di Iran bahkan dalam gerakan pembebasan ataupun demonstrasi lain dikawasan Timur Tengah seperti pada Revolusi Mesir dengan adanya

akun *We are all Khalid Said* yang berisi foto-foto dan kritikan terhadap kediktatoran rezim Husni Mubraok hingga pada konflik Syiria yang menyiarkan kekejaman rezim Ashaad (Amalia, 2016). Kehadiran internet dengan segala implikasinya sangat berguna sebagai alat kampanye dalam menyuarakan tuntutan, terlebih dalam *My Stealthy Freedom* yang fokus pada isu hijab tapi juga berkembang untuk menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan dasar hak asasi manusia (Koo, 2016). Kampanye online garapan Masih Alinejad ini berhasil menggunakan media sosial menjadi wadah kosmopolitanisme yang menjadi salah satu kunci dari gerakan sosial berbasis gender.

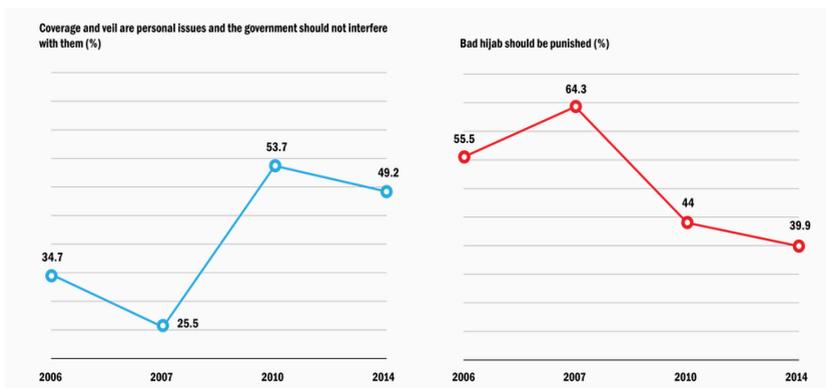
Tidak hanya bertumpu pada internet, kampanye kebebasan berhijab ini juga dinilai sebagai kampanye yang inovatif, pasalnya sang penggagas juga menyuarakan tuntutannya lewat buku yang ia tulis yang berjudul "*The Wind in My Hair: My Fight for Freedom in Modern Iran*". Suatu buku yang menceritakan bagaimana keadaan dan konstruk perempuan dibangun di Iran bahwa perempuan adalah mereka yang berperilaku lemah lembut, makhluk yang patuh, dan tidak boleh menyimpang dari kodrati (Moorhead, 2018). Sepertiga buku ini mengisahkan kehidupan Masih Alinejad dari perjuangan menentang keganjilan-keganjilan yang ada, kemiskinan, hingga tekanan politik. Buku ini menjelaskan konteks hijab di Iran dari konteks kewajiban untuk menggunakannya hingga menjadikannya bahasan transnasional soal dihapuskan atau tetap adanya aturan tersebut (Zakaria, 2018).

*My Stealthy Freedom* memang gerakan tadinya gerakan kecil yang berasal dari Iran dan menuntut terjadinya perubahan di Iran pula. Namun hingga kini gerakan ini keberadaanya tidak bisa dinafikan, terlebih soal tuntutan utamanya pada kebebasan berkespresi yaitu kebebasan berhijab. Gerakan ini telah menuai banyak atensi dari elemen global baik dari media, INGO, hingga pernghargaan yang didapat.

Pada media misalnya sudah tidak terhitung media-media dunia mengabarkan isu ini entah itu Guardian, Duestce Welle, The New York Times, Washington Post, BBC, CNN, dan media-media lain. Sedang dari kelompok INGO, yang sampai saat ini masih menyuarakan isu ini adalah Amnesty Internasional, suatu NGO yang fokus pada isu hak asasi manusia. Dimana Amnesty Internasional sampai saat ini masih mengkampanyekan kondisi perempuan ini dengan laporan-laporan yang disebarkannya, tidak hanya itu Amnesty juga sampai pada titik pemberian edukasi pada masyarakat terkait keadilan dan peran perempuan untuk membendung dominasi maskulinisme di Iran (Amnesty International, 2016). Eksistensi dari gerakan ini pun diakui salah satu buktinya pada diraihnya penghargaan oleh Masih Alinejad sebagai founder dari gerakan ini juga mendapat penghargaan pada *Geneva Human Right Summit* tahun 2015. Dalam laman Guardian dijelaskan bahwa penghargaan dianugerahkan karena “*giving voice to the voiceless and stiring the conscience of humanity to support the struggle of Iranian women for basic human rights, freedom, equality* (Dehghan, 2015).

Eksistensi yang ada dari kampanye ini juga sampai pada tingkatan adanya respon dari pemerintah. Membuktikan bahwa gerakan ini mempunyai dampak dimasyarakat. Dimana setelah peristiwa ditangkapnya 29 perempuan akibat aksi penentangan terhadap hijab, Rouhani memerintahkan *Iranian Center for Strategic Studies* untuk mengadakan laporan 4 tahunan yang membahas soal bagaimana hijab diterapkan di Iran dan dengan ini menghasilkan survei bahwa hampir setengah dari perempuan Iran menolak dikte kebijakan ini (Suzanne & Eliora, 2019). Dari sini pula nama Rouhani dianggap lebih baik daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya, ia dianggap sosok yang dapat mendengar tuntutan-tuntutan perempuan dan ini pula yang membuat dirinya diapresiasi (Mackintosh, 2018).

**Grafik 3. 1 Hasil Laporan Iranian Center for Strategic Studies Soal Dikte Hijab**



Sumber: (Suzanne & Eliora, 2019)

Bermula dari adanya niat baik penandatanganan Konvensi CEDAW adalah bukti yang dapat dilihat akan adanya suatu gerakan untuk membebaskan perempuan dari keterkungkungan yang ada. Dari sini, dari pemerintahan Khatami yang kemudian penulis anggap sebagai keran pembuka aliran gerakan kesetaraan gender yang mempengaruhi gerakan-gerakan dimasa selanjutnya. Jika penandatanganan Konvensi CEDAW ini sampai diajukan dua kali dalam dua periode pemerintahan Khatami yang berakhir hingga tahun 2005 dan sampai sekarang masih belum menemui jalan terang. Maka wacana kesetaraan gender yang menguap pun kemudian tidak serta merta mati seiring berakhirnya kepemimpinan Khatami. Gerakan-gerakan kesetaraan gender dimasa-masa sesudahnya justru menunjukkan pengingkatan. Dan gerakan-gerakan ini keberadaan dan aktivitasnya langsung dimotori oleh perempuan-perempuan Iran tanpa ada afiliasi politik didalamnya. Gerakan yang ada hanya berfokus pada muara tuntutan yang serupa yaitu adanya kehidupan yang demokratis dan pemenuhan terhadap keberadaan hak asasi manusia.

Meningkatnya aktivitas gerakan kesetaraan gender terbukti dari adanya gerakan-gerakan yang sudah peneliti jelaskan, yaitu *One Million Signatures* yang memiliki tuntutan untuk penghapusan terhadap produk hukum diskriminatif bagi perempuan di Iran dan *Green Movement* gerakan yang lahir karena peristiwa pemilihan presiden tahun 2009 yang memiliki tuntutan pada pemenuhan prinsip demokrasi seperti keterbukaan hasil pemilu, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hingga penegakan hukum yang adil. Dimana kedua aksi protes ini terjadi pada era kepresidenan Ahmadinejad yang dikenal sebagai tokoh fundamentalis dengan sederet kebijakan yang ketat. Aksi gerakan pembebasan lain yang masih berjalan hingga saat ini adalah kampanye *My Stealthy Freedom*. Suatu aksi protes yang menuntut adanya kebebasan dalam berhijab, yang bertolak dari adanya kebijakan yang mewajibkan hijab bagi perempuan di Iran apapun itu agamanya.

Ketiga bentuk gerakan yang lahir pasca kepemimpinan Khatami tersebut menjadi bukti adanya peningkatan aktivisme gerakan kesetaraan gender di Iran. Aksi-aksi yang pada awalnya hanya aksi kecil, dengan tuntutan yang terlihat sederhana bahkan terkesan tidak terlalu penting, namun pada akhirnya tetap bisa mempengaruhi bahkan menarik atensi dari dunia internasional, karena perjuangan dan keberanian perempuan dalam menyuarakan hak-hak dan tuntutan-tuntutan didalamnya. Bahkan sampai saat ini pun pembahasan mengenai hak dan kedudukan perempuan, feminisme, dan eksistensi ideologi Islam, juga kehadiran demokrasi masih menjadi diskursus yang panjang.

Dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi sekaligus menjadikan gerakan-gerakan pembebasan yang ada menggunakan *cyberspace* untuk menyuarakan tuntutan-tuntutannya dan menarik perhatian publik seperti *One Million Signatures* dan *My Stealthy Freedom*. Dari cara gerakan ini dalam menyuarakanuntutannya ini, kita juga sekaligus dapat memahami soal

bentuk baru dari kajian feminisme yaitu cyberfeminisme, suatu bentuk feminis gaya baru yang menggunakan internet sebagai alat untuk melawan dominasi patriarki. Cyberfeminisme menurut penemunya yaitu Sadie Plant didefinisikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebebasan gerakan feminis yang tertarik untuk menunjang suatu karya, memberikan kritikan, hingga berteori dengan eksplorasi pada internet (Andarwulan, 2017). Penggunaan media masa yang sangat mudah dan biaya yang ringan menjadikannya sebagai primadona gerakan-gerakan sosial untuk menyuarakan tuntutan-tuntutannya.

Cyberfeminisme menekankan aktivitasnya pada penggunaan internet karena internet dianggap menyediakan ruang yang netral dan bebas bagi setiap individu untuk menyuarakan tuntutan dan haknya. Lewat cyberfeminisme ini kita dapat melihat bahwa gerakan jaringan feminis dapat melalui media online, internet menjadi harapan besar kelompok feminis karena internet dianggap mampu mengubah susunan gender secara tradisional yang seringkali merugikan perempuan, dan cyberfeminisme juga mempunyai target yaitu pada kaum perempuan muda (Karimi, 2015). Cyberfeminisme adalah upaya yang dilakukan kelompok feminis yang melihat adanya teknologi dan ilmu pengetahuan adalah ranah unuk laki-laki (Marlina, 2018).

Internet dapat dikatakan sebagai cara termurah untuk menjangkau seluruh penduduk dunia, lebih lagi kehadiran internet dapat mendorong masyarakat diberbagai belahan negara untuk berkolaborasi dikancah global. Internet dengan segala impilkasinya ini yang sangat mempengaruhi kehidupan di Iran, internet bahkan disebut-sebut sebagai salah satu elemen yang berpengaruh dalam merubah kehidupan dimasyarakat Iran, terbukti dengan Iran yang dianggap sebagai negara dengan jumlah blogger terbanyak ke-4 didunia (Karimi, 2015). Dengan internet semua paham bisa masuk, bahkan ideologi baru pun bisa merubah dan menggantikan ideologi sebelumnya (Amalia, 2016). Internet memainkan

peran kunci sebagai sumber dan penyebar informasi sekaligus alat bagi gerakan sosial dalam menjalankan aktivitasnya

Persebaran paham feminisme dapat digambarkan terjadi karena adanya kesamaan perilaku yang dialami perempuan diberbagai belahan dunia yaitu ketidakadilan yang dialami perempuan baik itu karena praktik budaya misogini hingga undang-undang bias gender. Dengan ini feminisme sebagai sebuah paham hadir untuk bisa menghapuskan ketidakadilan tersebut. Sebagai paham yang sering dijuluki paham dari Barat, memang feminisme mengarah pada nilai-nilai barat seperti pada kebebasan dan penghargaan HAM.

Penelitian ini pun demikian bahwa pengaruh feminisme Barat terlihat dari adanya diskursus global yang dibawa terutama setelah adanya Konvensi CEDAW yang dicanangkan oleh PBB. Dari sinilah pentingnya penghargaan terhadap peran perempuan menjadi mengemuka, penting, dan wajib, terutama dimandatkan pada negara sebagai aktor yang dianggap memiliki kapasitas sentral dan dituntut dapat mengakhiri diskriminasi pada perempuan.

Keberlanjutan terhadap diskursus ini pun makin dikuatkan hingga kini dengan adanya point ke 5 dalam *Sustainable Development Goals*, suatu rencana pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB dan mempunyai target akhir ditahun 2030 nanti. Dimana point ke-5 ini adalah “*achieve gender equality and empower all women and girls*” atau kesetaraan untuk memberdayakan kelompok perempuan. Namun sayangnya tidak semua negara mendatangi konvensi ini, seperti kasus Iran dalam penelitian ini yang selalu mengalami jalan terjal berupa kuatnya ulama fundamentalis yang menolak nilai-nilai konvensi ini.

Feminisme Barat tapi bukanlah soal produk CEDAW dan SDGS semata, tuntutan-tuntutan dan nafas yang digulirkan dari gerakan kesetaraan gender yang ada di Iran saat ditelisik akan mengarah pada nilai-nilai liberal yang

sering dikonstruksi sebagai nilai Barat. seperti pada kebebasan dan penekanan terhadap HAM. Nilai-nilai liberal ini ternyata memiliki kesesuaian dengan salah satu aliran feminisme yaitu feminisme liberal.

Feminisme liberal sendiri dalam buku Ani Soetijpto didefinisikan sebagai sebuah aliran feminis yang menganggap bahwa keadilan gender akan dapat dicapai apabila dihapuskannya hambatan yang bersifat regulatif yaitu yang terkait dengan hukum, yang menjadi pembeda hak antara laki-laki dan perempuan, setelah itu juga perlu integrasi gender yang adil pada perempuan (Soetijpto, 2013). Nur Azizah juga menjelaskan dalam bukunya menjelaskan perspektifnya bahwa dalam feminisme liberal kedudukan dan peran perempuan dapat tersubordinat karena ketimpangan hak dan peluang dimasyarakat, maka dengan ini sangat perlu adanya persamaan hak diantara kedua jenis kelamin tersebut dalam suatu negara, mengingat negara adalah cermin dari pluralitas politik (Azizah, 2017).

Gerakan-gerakan kesetaraan gender di Iran yang mempunyai tuntutan seperti penghapusan hukum diskriminatif, pemenuhan prinsip demokrasi dan HAM dan nafas yang mengusung nilai-nilai kebebasan ini sungguh jelas kesamaanya dengan prinsip feminisme liberal yaitu menghapuskan domestifikasi dan hambatan-hambatan regulative yang ada pada keberadaan perempuan untuk mencapai akses dan hak yang sama.

Praktik-praktik pembebasan yang digelorkan sampai saat ini menunjukkan bahwa eksistensi dan fungsi sistem *Velayet el- Faqeh* mulai terkikis. Melihat hal tersebut penulis kemudian menemui alasan mengapa masyarakat semakin menjauhi ideologi tersebut diantaranya seperti kesenjangan antar generasi setelah revolusi berlangsung, imbas dari perubahan konstelasi politik pasca perang dingin, sulitnya penerapan ideologi Islam, ketidaknyamanan terhadap ideologi Islam, pengambilan keputusan yang tidak melibatkan dan

tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, peran ulama yang terlalu luas, hingga penyesalan akan terjadinya Revolusi Besar 1979 (Fahrudin, 2007) (Reza, 2017).

Penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan adalah bukti bahwa sampai saat ini perempuan di Iran masih menganggap adanya perilaku diskriminatif, bahkan perbedaan dari perilaku ini dilegalisasi oleh negara dan dijalankan oleh kelompok ulama fundamentalis. Perempuan Iran sampai saat ini masih berjuang untuk bisa mendapatkan keadilan versi mereka. Meskipun sampai saat ini keberadaan mengenai tuntutan-tuntutan dan aktivisme-aktivisme perempuan di Iran masih mengalami perdebatan. Namun pengaruh feminisme dalam tubuh Iran adalah hal yang nyata adanya. Penulis disini menganggap ini adalah feminisme Barat terkhusus pada aliran feminisme liberal, tapi penulis juga tidak menutup perbedaan pemikiran yang lain. Karena pada hakikatnya sampai saat ini kajian menyoal feminisme dan Hubungan Internasional adalah kajian yang maha luas, dinamis, dan terus tumbuh, bahkan para peneliti pun belum memiliki kesepakatan atas konsep dasar dan konsekuensi yang timbul dari adanya pemahaman ini (Soetjipto, 2013).

Penjabaran dua argumen penulisan yang ada, jika diperdalam pada intinya akan bermuara pada adanya keinginan besar untuk membuat bahasan mengenai gender terkhusus pada peran, kedudukan, dan hak perempuan menjadi bahasan yang umum dan dapat diterima masyarakat. Meningat keadaan perempuan di Iran yang sampai saat ini masih dianggap menjadi warga negara kelas dua. Gerakan-gerakan kesetaraan gender yang ada yaitu gerakan yang mengupayakan adanya perubahan pada perempuan berusaha mengarusutamakan isu ini untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pengakuan pada hak dan peran perempuan, akan pentingnya keadilan yang harus diterima oleh semua warganegara.

Teori *gender mainstreaming* seperti yang sudah dikemukakan menjelaskan soal proses atau langkah untuk mencapai kesetaraan gender bukan menjelaskan soal hasil. Proses *gender mainstreaming* ini yang kemudian dilihat penulis justru datang dari gerakan-gerakan kesetaraan ini, bukan datang dari pemerintah. Mengingat didalam pemerintah terlalu banyak aktor dan kepentingan. Keinginan terbesar dari gerakan ini adalah kehidupan Iran yang demokratis dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Gerakan-gerakan ini adalah input berupa *demand* yang diajukan pada rezim untuk bagaimana caranya bisa mengintegrasikan gender secara adil dalam mendukung pembangunan suatu bangsa.

Aktivitas yang sedari dulu ditunjukkan gerakan-gerakan pembebasan perempuan di Iran dalam kurun waktu tiga dekade terkahir sekaligus menjadi aktor utama dalam proses demokratisasi dalam bidang sosial, politik, budaya di Iran, menunjukkan bagaimana besarnya minat masyarakat akan kehidupan yang lebih demokratis (Birgani, 2010). Pertumbuhan gerakan-gerakan perempuan di Iran sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik yang ada mulai dari yang reformis hingga neo-konservatif, yang menjadikan bukti bahwa gerakan-gerakan tersebut juga mempunyai aspek erat dengan ideologi politik yang ada di tiap-tiap masanya (Kamaluddin, 2011). Dari sini penulis berpikir untuk pentingnya menaruh bagaimana perkembangan di tiap kepemimpinan presiden, mengingat bahwa presiden mempunyai kapabilitas untuk bisa menciptakan suatu tatanan sosial bahkan pendorong motor perubahan. Gerakan perempuan di Iran sekaligus juga menjadi gerakan terpanjang dan paling bertahan untuk menuntut adanya perubahan di Republik Islam Iran. Akibat besarnya peran perempuan dalam perubahan yang terjadi di Iran maka tak heran jika perempuan diklasifikasikan sebagai komponen demokrasi bersama para intelektual dan mahasiswa (Cipto, 2004).